

BAB II

URGENSI INDO-PACIFIC TREATY TERHADAP PERLUASAN KERJA SAMA ANTAR NEGARA KAWASAN

Dalam beberapa dekade terakhir, perdamaian, stabilitas, dan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan telah membawa perubahan-perubahan yang signifikan di kawasan Indo-Pasifik. Tingkat kemakmuran dan kesejahteraan meningkat tajam di sejumlah negara-negara kawasan. Kekuatan-kekuatan baru seperti Cina, India, Korea Selatan, dan ASEAN semakin menunjukkan pengaruhnya baik di tingkat kawasan maupun tingkat global.

Kemajuan ekonomi dan pertimbangan strategis lainnya juga mendorong negara-negara kawasan untuk meningkatkan kapasitas militernya. Perkembangan tersebut perlahan namun pasti, telah mengubah peta arsitektur kekuatan di kawasan, yang dalam beberapa tahun terakhir ini didominasi oleh Amerika Serikat, Rusia, Inggris dan Jepang pasca Perang Dunia II. Perubahan-perubahan strategis tersebut membawa peluang sekaligus tantangan bagi kawasan. Peluang untuk terus meningkatkan kemajuan sosial-ekonomi negara-negara kawasan dan tantangan untuk mengatasi kecurigaan dan ketidakpercayaan, serta mempertahankan perdamaian dan stabilitas kawasan.

Kebangkitan Cina di bidang ekonomi merupakan salah satu fenomena yang terjadi di kawasan Indo-Pasifik. Dan karena perekonomian yang kuat inilah Cina dapat meningkatkan kekuatan militernya. Cadangan devisa Cina terus meningkat, dari sebesar US \$165,6 miliar pada tahun 2000, menjadi sebesar US \$3.181,1 miliar pada tahun 2011. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Cina sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2012 stabil di angka 7%. Dari kebangkitan sektor

ekonomi tersebut, Cina kemudian bisa meningkatkan kekuatannya di sektor pertahanan. Tercatat pada tahun 2014 anggaran pertahanan Cina sebesar US \$129,4 miliar dan merupakan negara dengan anggaran pertahanan terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat (sebesar US \$581 miliar) serta berada di atas dua negara besar lainnya yakni Rusia (US \$70 miliar) dan Jepang (US \$47,7 miliar). Di kawasan Indo-Pasifik, selain Cina yang anggaran sektor pertahanannya diperkirakan naik sebesar 18,8% pada tahun 2015, negara-negara lainnya juga meningkatkan anggaran sektor pertahanannya seperti Jepang yang menaikkan anggaran sektor pertahanannya hingga 2,5%, Korea Selatan yang meningkatkan anggaran sektor pertahanannya hingga 3,2%, Australia yang meningkatkan anggaran sektor pertahanannya hingga 10% (Purnama, 2017)

A. SEJARAH KONSEP INDO-PASIFIK

Strategi Indo-Pasifik telah mendapatkan perhatian dalam beberapa waktu terakhir. Pada tanggal 18 Oktober 2017, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Rex Tillerson menyebutkan konsep “Indo-Pasifik Bebas dan Terbuka” (*Free and Open Indo-Pacific—FOIP*) yang diadopsi oleh Presiden Donald Trump pada November 2017 saat kunjungannya ke Asia (Suryadinata, 2018)

Istilah "Indo-Pasifik" digunakan dalam pidato Trump. Pada awal Mei 2018, Komando Pasifik Amerika Serikat mengubah namanya menjadi Komando Indo-Pasifik. Seorang Pakar Keamanan Australia kemudian mengamati bahwa konsep ini dimaksudkan untuk “melemahkan pengaruh Cina di lautan yang lebih luas”. Dari sudut pandang Beijing, perubahan itu memiliki tujuan untuk “menahan Cina”. Apapun masalahnya, konsep ini sedang dikembangkan oleh Amerika Serikat dari sebuah tindakan keamanan belaka menjadi memasukkan dimensi ekonomi.

Faktanya, Indo-Pasifik pertama kali dibahas oleh Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pada tahun 2007 dalam pidatonya ke parlemen India. Abe mendesak India untuk bersama-sama aktif di kawasan Indo-Pasifik dengan negara-negara Barat untuk menjamin keamanan maritim kawasan dan, untuk lebih jauh, kerjasama ekonomi. Segera setelah itu kelompok dialog keamanan informal yang dikenal sebagai QUAD (*Quadrilateral Security Dialogue*), yang terdiri dari Jepang, Amerika Serikat, Australia dan India didirikan.

Pada 19 November 2011, semua negara (termasuk negara-negara ASEAN, Cina, Rusia, India, Jepang dan Australia) yang berpartisipasi dalam KTT Asia Timur (*East Asia Summit*) di Bali mengadopsi Deklarasi KTT Asia Timur tentang prinsip-prinsip untuk hubungan yang saling menguntungkan, yang mana hal ini termasuk menghormati kedaulatan negara dan penggunaan non-kekerasan untuk menyelesaikan masalah. Marty Natalegawa, Menteri Luar Negeri Indonesia saat itu, didorong oleh deklarasi ini, dan ingin mengubah deklarasi tersebut menjadi perjanjian formal. Barulah pada 16 Mei 2013, ketika Marty memberikan pidato di CSIS di Washington D.C. ia menggunakan istilah “wilayah Indo-Pasifik” secara eksplisit.

Marty menyatakan bahwa istilah Indo-Pasifik semakin banyak digunakan tetapi tidak lazim dalam kamus geopolitik, dan bahwa dia bersedia menggunakan istilah itu. Dia menyampaikan bahwa negara-negara di Samudera Hindia dan Samudera Pasifik adalah negara penting dengan Indonesia sebagai negara yang menghubungkan kedua samudera ini. ASEAN, termasuk Indonesia, hanya bisa aman dan stabil jika ada perdamaian dan kemakmuran di wilayah Indo-Pasifik. Marty mengingatkan para peserta bahwa pada tahun 2011, prinsip-prinsip deklarasi EAS untuk hubungan yang saling menguntungkan diadopsi oleh negara-negara kawasan Indo-Pasifik; ia akhirnya mengusulkan agar itu diubah menjadi “Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama Indo-Pasifik” (*Indo-Pacific Treaty of Friendship and Cooperation*) untuk digunakan

sebagai mekanisme untuk mengelola urusan keamanan regional. Rizal Sukma, seorang sarjana HI Indonesia terkemuka yang setuju dengan Marty, mencatat bahwa “hubungan internasional yang didasarkan pada kekuasaan saja akan mengarah pada politik kekuasaan murni dengan implikasi yang bersifat menghancurkan bagi stabilitas regional. Dalam konteks ini, perjanjian Indo-Pasifik dapat memberikan kerangka kerja untuk 'keseimbangan dinamis' yang ingin dibangun Marty.”

Pendekatan Indo-Pasifik belum menjadi kebijakan luar negeri resmi Jepang ketika Abe bertemu Jokowi pada Januari 2017. Hanya setelah kembali ke Jepang barulah Kementerian Luar Negerinya mulai mengembangkan konsep dan secara resmi mengusulkannya pada April 2017 sebagai strategi “Indo-Pasifik Bebas dan Terbuka” yang sejak itu menjadi tulang punggung kebijakan keamanan Shinzo Abe. Perspektif Indo-Pasifik Marty berbeda dari Konsep Indo-Pasifik Shinzo Abe. Dalam perspektif Marty, Indo-Pasifik diartikan sebagai kawasan yang inklusif, dan tidak terbatas pada negara-negara demokratis barat. Ini mencakup Cina dan Rusia, dua negara yang menandatangani Deklarasi EAS di Bali. Sementara perspektif Indo-Pasifik seperti yang diusulkan oleh Marty belum diambil oleh negara mana pun, strategi “Indo-Pasifik Bebas dan Terbuka” yang diusulkan oleh Shinzo Abe telah diadopsi oleh administrasi Trump.

Pada bulan November 2017, tujuh bulan setelah rilis FOIP di Tokyo, Australia merilis Buku Putih Kebijakan Luar Negeri guna mempromosikan, memperkuat dan mempertahankan “Suatu kawasan Indo-Pasifik yang terbuka, inklusif dan makmur”. Pada bulan Desember 2017, Gedung Putih merilis Strategi Keamanan Nasional Amerika Serikat di mana hal tersebut diidentifikasi oleh Cina dan Rusia sebagai usaha “Menantang kekuatan, pengaruh, dan kepentingan Amerika”.

Pada 22-24 Januari 2018, Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Jim Mattis mengunjungi Indonesia. Sebelum

mengunjungi Jakarta, Mattis telah menyampaikan pidato di Universitas Johns Hopkins, mengungkap pergeseran prioritas pertahanan AS. Dia menyatakan bahwa fokus utama keamanan nasional Amerika Serikat, tetapi “persaingan kekuasaan yang besar”. Indo-Pasifik tidak disebutkan dalam konferensi pers, tetapi dibahas antar Menteri Luar Negeri Retno dan Mattis. Retno menyambut konsep Indo-Pasifik (Konsep Arsitektur Indo-Pasifik) yang didasarkan pada prinsip keterbukaan, semangat kerja sama. Hanya melalui prinsip-prinsip inilah Indo-Pasifik dapat mencapai perdamaian dan stabilitas. Retno juga mencatat bahwa “Indonesia terbuka untuk berdiskusi dan mengembangkan Indo-Pasifik dengan negara mana pun, termasuk AS.”

Pada 9 Agustus 2018, barulah Menteri Luar Negeri RI Retno secara resmi mempresentasikan Konsep Kerjasama Indo-Pasifik Indonesia ke Pertemuan Tingkat Menteri 8 KTT Asia Timur. Retno dan diplomat Indonesia telah berkampanye untuk pengarahan dan melobi para peserta. Dalam sambutannya, Retno sangat menekankan pentingnya inisiatif Indonesia dalam pengaturan geopolitik saat ini di mana negara-negara di kawasan Indo-Pasifik memiliki potensi baru. Menteri luar negeri RI meyakinkan menteri EAS lainnya bahwa proposal adalah “bukan untuk menciptakan mekanisme baru atau mengganti yang sudah ada, tetapi untuk meningkatkan kerja sama menggunakan mekanisme yang ada. Retno mengidentifikasi EAS sebagai platform ideal untuk mendorong kerjasama ekonomi di kawasan Indo-Pasifik. Para Menteri menantikan diskusi lebih lanjut tentang berbagai konsep Indo-Pasifik, yang harus merangkul prinsip-prinsip utama seperti sentralitas ASEAN, keterbukaan, transparansi, inklusivitas, sembari berkontribusi pada rasa saling percaya, saling menghormati dan saling menguntungkan.

B. INDO-PASIFIK DALAM PANDANGAN INDONESIA

Indonesia adalah salah satu negara di kawasan Indo-Pasifik yang telah mengalami peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan yang cukup signifikan. Indonesia memiliki kepentingan untuk mempertahankan kondisi Indo-Pasifik yang tetap kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan keamanan nasionalnya, oleh karena itu Indonesia tidak bisa membiarkan situasi politik, ekonomi dan keamanan kawasan ditentukan semata-mata oleh negara-negara lain.



Gambar 1: Peta kawasan Indo-Pasifik

Merujuk pada segi geografis, istilah Indo-Pasifik yang berada di dalam gagasan *Indo-Pacific Treaty of Friendship and Cooperation* merupakan kawasan yang terbentang dari dua Samudra, yakni Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kawasan ini dianggap penting karena dilewati beberapa jalur pelayaran paling penting di dunia yakni sebagai jalur utama pergerakan perdagangan dunia yang menyambungkan dua Samudra tersebut. Saat ini kawasan Indo-Pasifik adalah sebuah kekuatan ekonomi yang berperan sebagai mesin dalam pertumbuhan ekonomi global dan mencakup sekitar dua per tiga

dari perdagangan global. Penggunaan istilah Indo-Pasifik akan bisa mewujudkan interkoneksi antara kawasan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik di masa depan.

Perspektif Indo-Pasifik secara otomatis menempatkan Indonesia dan kawasan Asia Tenggara sebagai titik sentral yang menghubungkan kawasan Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. Posisi strategis tersebut menyebabkan berbagai strategi Indo-Pasifik yang dikembangkan negara-negara lain secara langsung maupun tidak langsung pasti akan berdampak pada Asia Tenggara. Sebagai negara berkembang, Indonesia belum bisa semata mengandalkan kekuatan materialnya (ekonomi dan militer) untuk mempengaruhi dan membentuk kondisi kawasan yang kondusif dari sisi kepentingan nasional. Oleh karena itu, kebijakan kawasan ditekankan pada pengembangan tatanan, mekanisme, institusi kerja sama kawasan yang memungkinkan semua negara baik besar, menengah dan kecil mengelola kepentingan bersama. Suatu mekanisme kerja sama kawasan yang memungkinkan negara-negara untuk mengembangkan kerja sama yang saling menguntungkan dan membahas serta mengelola potensi konflik, ketidakpercayaan, kecurigaan dan berbagai bentuk ancaman lainnya.

Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi telah memiliki konsep Poros Maritim Dunia yang ditujukan untuk membuat Indonesia menjadi negara yang kuat secara maritim. Pada 11 Januari 2018, Menteri Luar Negeri Retno membuat surat pidato panjang di UNGA (*United Nations General Assembly*) yang berjudul "Mitra untuk Perdamaian, Keamanan dan Kemakmuran" di mana ia membahas konsep Indo-Pasifik Indonesia. Dia mencatat bahwa terkait dengan arsitektur kawasan di masa depan, Indonesia menginginkan adanya ekosistem yang damai, stabilitas, kemakmuran yang akan didirikan tidak hanya di ASEAN tetapi juga di Samudera Hindia dan Samudera Pasifik atau Indo-Pasifik. Dia melanjutkan: "Oleh karena itu, bersama-sama dengan ASEAN, Indonesia akan terus berkontribusi dalam memajukan kerja sama positif yang kuat di Indo-Pasifik, alih-alih kerja sama berdasarkan

kecurigaan atau lebih buruk, persepsi ancaman.” Dia juga mengatakan bahwa Indonesia akan bekerja dengan negara-negara di kawasan ini untuk mengembangkan “payung kerja sama Indo-Pasifik” yang bertujuan untuk membangun kerja sama kepercayaan yang dimaksudkan untuk “bebas, terbuka, inklusif dan komprehensif.”

Untuk menghasilkan keseimbangan dinamis di kawasan Indo-Pasifik, diusulkan pembentukan *Indo-Pacific Treaty of Friendship and Cooperation*, yang merupakan komitmen dari negara-negara di kawasan untuk membangun kepercayaan diri, menyelesaikan sengketa dengan cara damai, dan mempromosikan konsep keamanan yang mencakup semua dimana keamanan adalah milik bersama. *Indo-Pacific Treaty* bertujuan untuk meningkatkan saling percaya sekaligus mengesampingkan penggunaan kekerasan dalam menyelesaikan sengketa antara negara-negara di dalam kawasan.

Gagasan Marty Natalegawa mengenai *Indo-Pacific Treaty* mendapat dukungan karena maknanya dinilai sesuai dengan gagasan awal pembentukannya. Di antaranya dikatakan bahwa *Indo-Pacific Treaty* dikonsepsikan untuk menjadi mekanisme pembangunan norma dan prinsip bagi sebuah kawasan yang senantiasa berubah dan diharapkan dengan *Indo-Pacific Treaty* ini akan bisa menciptakan keamanan bersama yang dihasilkan dengan tidak mengorbankan pihak-pihak lain yang ada di dalam kawasan tersebut. Hal tersebut juga didukung oleh pernyataan Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mengartikan *Indo-Pacific Treaty* sebagai traktat persahabatan dan kerjasama dengan tujuan meningkatkan rasa saling percaya dan penggunaan cara damai dalam menyelesaikan sengketa.

Indo-Pacific Treaty yang diusulkan oleh Marty Natalegawa ini merupakan traktat yang akan mengadopsi dan mengaplikasikan konstruksi dari norma dan aturan yang telah ada yang digunakan ASEAN, yaitu *Treaty of Amity and*

Cooperation (atau disingkat dengan TAC). Namun dapat dikatakan bahwa *Indo-Pacific Treaty* akan menjadi lebih ambisius dibandingkan dengan TAC. Hal tersebut dikarenakan *Indo-Pacific Treaty* bertujuan untuk dapat mengantisipasi konflik di kawasan Indo-Pasifik serta menawarkan mekanisme pencegahan dan resolusi konflik. Tujuan gagasan *Indo-Pacific Treaty* yakni berkontribusi dalam perdamaian dan keamanan dengan mempromosikan rasa percaya dan menyelesaikan sengketa dengan cara damai; menawarkan mekanisme untuk pencegahan dan resolusi konflik; menjadi alternatif dari kompetisi kekuatan besar di kawasan Indo-Pasifik; serta bertujuan agar negara-negara di kawasan akan mulai berpikir tentang diri mereka sebagai anggota komunitas yang bertanggung jawab untuk keamanan bersama.

Perdamaian dan stabilitas didalam kawasan seharusnya dihasilkan melalui promosi keamanan, kesejahteraan dan stabilitas bersama. Keamanan hanya bisa dinikmati oleh banyak negara jika keamanan dilihat sebagai sebuah kebersamaan dan bukan sebagai sesuatu yang diperoleh dengan mengorbankan yang lain. Sebuah keseimbangan dinamis dihasilkan melalui promosi rasa tanggung jawab bersama dalam usaha untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan. Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berpendapat bahwa semangat *dynamic equilibrium* menunjukkan pola hubungan yang dilandasi oleh semangat kerja sama dan kemitraan sehingga kompetisi ataupun konfrontasi harus dijauhkan. Negara-negara di kawasan Indo-Pasifik harus yakin bahwa kemajuan sebuah negara merupakan peluang bagi peningkatan kerja sama.

Konsep Indonesia memuat visi yang jelas mengenai kawasan Indo-Pasifik, yaitu, sebagai suatu kawasan kerja sama bukan rivalitas, sebagai kawasan untuk pembangunan dan kemakmuran bersama, menekankan perspektif maritim dalam kerja sama kawasan, serta memandang kawasan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik sebagai satu kawasan Indo-Pasifik yang terintegrasi dan terinterkoneksi. Konsep Indonesia

tersebut juga didasarkan pada prinsip-prinsip yang selama ini mendasari berbagai mekanisme kerja sama kawasan, antara lain seperti prinsip keterbukaan (*open regionalism*), transparansi (dalam tata perilaku), inklusif (meningkatkan pemangku-pemangku kepentingan berdasarkan kepentingan bersama), penghormatan atas hukum-hukum internasional, pengakuan kedaulatan negara, dan sentralitas ASEAN.

Konsep Indo-Pasifik Indonesia memberikan prioritas pada penguatan tatanan, mekanisme dan institusi kerja sama kawasan. Indonesia di satu sisi ingin memperkuat mekanisme kerja sama kawasan yang sudah dikembangkan ASEAN dengan negara-negara mitranya, seperti forum *East Asia Summit* (EAS), *ASEAN Regional Forum* (ARF), dan *ASEAN Defence Minister's Meeting* (ADMM). Di sisi lain Indonesia juga ingin mendorong kerja sama antara ASEAN *led mechanism* tersebut dengan Negara dan organisasi lain di kawasan Indo-Pasifik untuk menangani isu-isu yang menjadi kepentingan bersama. Mekanisme kawasan yang dibentuk oleh ASEAN, khususnya EAS, harus menjadi motor penggerak utama kerja sama di kawasan Indo-Pasifik, dimana ASEAN dan negara-negara utama di kawasan Indo-Pasifik adalah anggota EAS (Tene, 2019)

Konsep kerja sama Indo-Pasifik yang dikembangkan Indonesia juga tidak bermaksud untuk menyaingi berbagai strategi Indo-Pasifik yang lain. Kawasan Indo-Pasifik cukup luas untuk dapat mengakomodasikan berbagai strategi kerja sama kawasan. Konsep Indonesia yang menekankan pada penguatan dan pengembangan tatanan, mekanisme dan institusi kerja sama kawasan yang berpusat pada ASEAN justru membantu meredam peningkatan persaingan strategis di kawasan Indo-Pasifik. Yang perlu menjadi perhatian Indonesia dan ASEAN adalah agar berbagai strategi Indo-Pasifik yang dikembangkan oleh negara-negara di kawasan harus dapat berkontribusi bagi pengembangan kawasan Indo-Pasifik yang damai, stabil, dan sejahtera. Indonesia dan ASEAN sebagai penggerak utama berbagai institusi kerja sama kawasan

memiliki peran penting untuk memastikan terwujudnya hal tersebut.

Pada intinya, kerja sama ASEAN dengan negara-negara mitra adalah untuk memastikan agar kekuatan-kekuatan luar kawasan Asia Tenggara menghormati dan mendukung upaya ASEAN menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, stabil dan sejahtera. Indonesia juga sepenuhnya menyadari bahwa stabilitas kawasan Asia Tenggara sangat bergantung pada situasi dan kondisi di kawasan yang lebih luas yang mengelilingi kawasan Asia Tenggara, yaitu kawasan Indo-Pasifik.

C. IMPLIKASI INDO PASIFIK BAGI KERJASAMA KAWASAN

Dalam prosesnya, kawasan Indo-Pasifik akan menghadapi tantangan-tantangan yang beragam atau *multi-faceted challenges* yang tidak dapat dihindari (Natalegawa, 2013). Tantangan pertama adalah *trust-deficit* atau defisit kepercayaan. Tantangan yang dihadapi saat ini sangat mungkin untuk berkembang menjadi ancaman besar bahkan sampai menjadi konflik terbuka karena meningkatnya faktor ketidakpercayaan yang dapat meningkatkan tensi permasalahan tersebut. Cara penyelesaiannya adalah dengan membangun kepercayaan dan keyakinan, mengutamakan rasa saling menahan diri, membangun komunikasi. Komunikasi yang jelas dan terbuka antara negara-negara sekawasan diperlukan untuk menghindari konflik yang disebabkan oleh defisit kepercayaan antarnegara

Tantangan kedua adalah *unresolved territorial claims* atau sengketa wilayah yang belum terselesaikan. Terkait sengketa wilayah yang belum terselesaikan ini dibutuhkan komitmen dari pihak-pihak yang bersengketa wilayah untuk menghormati dan menyelesaikan sengketa secara damai sesuai dengan aturan-aturan tertentu yang telah disepakati agar menghindari kesalahan perhitungan atau munculnya krisis yang

tidak diinginkan. Contoh dari masalah sengketa wilayah yang sangat krusial saat ini di kawasan Indo-Pasifik adalah sengketa wilayah di Laut Cina Selatan dan Laut Cina Timur.

Tantangan ketiga adalah *managing the impact of change* atau mengelola perubahan. Perubahan dan transformasi terjadi di seluruh kawasan Indo-Pasifik dalam bidang politik dan ekonomi yang memiliki dampak tidak hanya bagi internal negara tersebut tetapi juga negara-negara di sekitarnya. Sejalan dengan munculnya perubahan, maka muncul juga tantangan baru yang dapat dihadapi dengan cara menjalin hubungan kemitraan atau dengan cara berkompetisi. Terkait tantangan ketiga ini, dikarenakan perubahan dalam bidang ekonomi, keamanan dan politik di kawasan Indo-Pasifik tidak akan berakhir, maka hal ini yang menjadi inti dibutuhkan sebuah perspektif baru dalam mengelola keamanan di kawasan Indo-Pasifik.

Selain itu terdapat dua masalah dalam mewujudkan gagasan pembentukan *Indo-Pacific Treaty*. Pertama, tidak adanya dukungan dari negara-negara besar atas gagasan *Indo-Pacific Treaty* menjadi salah satu masalah dalam mewujudkan gagasan ini. Ram mengutip pernyataan dari Bandoro yang berpendapat bahwa tidak akan ada jaminan bahwa negara-negara besar akan menyetujui seperti yang diharapkan oleh Indonesia. Indonesia juga tidak mempunyai kemampuan untuk mendikte arah strategis negara-negara besar tersebut, sehingga kesuksesan gagasan *Indo-Pacific Treaty* ini masih bisa diperdebatkan.

Sejalan dengan itu, dikatakan oleh Medcalf (Purnama, 2017) bahwa permasalahan dalam mewujudkan gagasan *Indo-Pacific Treaty* secara tidak langsung memang terletak pada persetujuan negara-negara besar atas gagasan ini. Masalah ini juga terjadi pada TAC, yakni dimana negara-negara besar menyatakan menghormati institusi dan perjanjian yang ada, namun pada akhirnya mereka masih mencoba untuk menyelesaikan perselisihan mereka melalui paksaan dan

pengaruh. Contohnya TAC tidak dapat menghentikan Cina dalam menggunakan paksaan dan ancaman kekuatan yang tersirat untuk mengubah status quo di Laut Cina Selatan.

Tanpa dukungan dari negara-negara kuat di dalam *Indo-Pacific Treaty*, maka norma-norma yang dalam hal ini berupa harapan agar negara-negara tidak akan menggunakan kekuatan atau paksaan, tidak akan menjadi pencegah yang dibutuhkan. Banyak negara akan terus bergantung pada mitra aliansi tradisional mereka untuk perlindungan atau untuk memberikan keseimbangan kepada negara agresif lainnya. Dari pendapat-pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada jaminan bahwa negara-negara besar akan menyetujui gagasan ini dan Indonesia tidak memiliki kemampuan untuk mendikte arah strategis negara-negara besar tersebut. Tanpa adanya dukungan tersebut, maka norma dan aturan yang akan dibuat dalam gagasan ini tidak akan berhasil menjadi alat untuk mencegah penggunaan kekuatan atau paksaan dalam penyelesaian masalah keamanan di kawasan Indo-Pasifik.

Permasalahan kedua yakni tidak adanya *blueprints* yang menggambarkan dengan jelas bagaimana cara untuk mewujudkan gagasan *Indo-Pacific Treaty* ini. Hal tersebut sesuai yang dikemukakan oleh Liow bahwa tujuan mulia dari *Indo-Pacific Treaty* yang diusulkan oleh Indonesia ini tidak disertai dengan *blueprints* yang menggambarkan dengan jelas bagaimana cara untuk mewujudkannya. Tidak adanya *blueprint* menjadi masalah tersendiri dalam mewujudkan gagasan ini. Terlebih lagi dengan tidak adanya *blueprint* tersebut, Indonesia tidak memiliki dasar pegangan untuk meyakinkan negara-negara besar untuk memberikan dukungan dalam mewujudkan gagasan dan tujuan dari *Indo-Pacific Treaty* ini.

Dengan mempertimbangkan kondisi di kawasan pada saat ini, Ram menyebutkan strategi yang dapat dilakukan sebagai langkah awal jika ingin mewujudkan gagasan *Indo-Pacific Treaty* ini. Pertama adalah membangun kepercayaan dan keyakinan di antara negara-negara besar di kawasan. Hal

ini menjadi syarat yang sangat penting agar bisa berhasil mewujudkan apapun. Langkah selanjutnya adalah melembagakan arsitektur kawasan Indo-Pasifik. Langkah ini merupakan tugas yang menantang dan membutuhkan proses terkait dengan konflik kepentingan dari negara-negara besar di kawasan. Lebih lanjut, ditambahkan bahwa selain menciptakan konsensus di antara negara-negara besar, juga perlu untuk menciptakan pemahaman bersama di antara negara-negara menengah dan berkembang seperti Indonesia, India dan Australia. Hal tersebut menjadi vital dan penting mengingat negara-negara tersebut memiliki lokasi strategis.

Dari pendapat Ram tersebut, dapat dikatakan bahwa strategi yang diusulkannya terdiri atas tiga langkah sebagai berikut: (1) membangun kepercayaan dan keyakinan di antara negara-negara besar di kawasan; (2) menciptakan pemahaman bersama di antara negara-negara menengah dan berkembang yang memiliki lokasi strategis di dalam kawasan Indo-Pasifik; (3) melembagakan arsitektur kawasan Indo-Pasifik.

D. KETERBUKAAN KAWASAN DALAM KERJA SAMA INDO-PASIFIK

Meskipun menghadapi tantangan-tantangan yang beragam, konsep kerja sama Indo-Pasifik ini sesungguhnya sudah disepakati negara-negara ASEAN seperti yang dikatakan oleh Menteri Luar Negeri Retno dalam KTT ASEAN ke-33 di Suntec Convention Centre, Singapura (Menlu sebut konsep Indo-Pasifik disepakati ASEAN, 2018). Menurutnya, konsep Indo-Pasifik itu sendiri merupakan *living document* dalam artian sembari dijalankan, konsep itu juga diperkaya dengan ide-ide agar menjadi konsep yang lebih matang dan jelas. Yang menjadi tugas Indonesia selanjutnya sebagai penggagas dan negara-negara mitra selaku negara yang berkepentingan di kawasan Indo-Pasifik adalah mengeksekusi konsep tersebut menjadi tindakan yang nyata. Untuk mewujudkannya, perlu adanya keterbukaan kawasan agar rivalitas bisa ditekan menjadi

kerja sama saling menguntungkan. Hal ini penting karena disamping menghasilkan kerja sama kawasan, jika berhasil dieksekusi, maka kedamaian, keamanan dan stabilitas kawasan juga semakin terjamin.

Beberapa negara kawasan Indo-Pasifik mulai menunjukkan keterbukaan mereka dengan menyetujui kerja sama maritim yang didorong oleh Indonesia. Sebagai contoh, Indonesia mengajak India, Australia dan Thailand untuk bekerja sama menjaga stabilitas kawasan serta pengembangan konsep Indo-Pasifik. Amerika dan Cina yang tidak luput dari perhatian karena memiliki kepentingannya sendiri di kawasan tersebut. Vijay Thakur Singh, ketua Delegasi India mengapresiasi Indonesia atas inisiatif pelaksanaan Pertemuan *High Level Dialogue on Indo-Pacific Cooperation* tanggal 20 Maret 2019 di Jakarta yang dinilai bermanfaat dan tepat waktu. Ia menegaskan pula komitmen India untuk menjaga stabilitas, perdamaian, dan kemakmuran di kawasan. Kerja sama yang saling menguntungkan senantiasa perlu diutamakan di tengah situasi geopolitik yang dinamis dan upaya negara besar memperebutkan pengaruh di kawasan (Indonesia Dorong Kerja Sama Maritim ASEAN-India di Kawasan Indo-Pasifik, 2019).

Sementara itu pada pertemuan ke-31 ASEAN-Australia Forum yang diselenggarakan di Malaysia, Jose Tavares selaku Dirjen Kerja Sama ASEAN menuturkan, “Berbagai kerja sama Indo-Pasifik yang ditawarkan oleh negara-negara besar memberikan kesempatan sekaligus tantangan. Secara alami, negara-negara besar akan senantiasa memperkuat pengaruhnya di kawasan dan siap untuk saling bersaing. ASEAN yang terletak di tengah dinamika geostrategis ini perlu terus menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan. Menjadi kepentingan utama ASEAN untuk memastikan dinamika geostrategis saat ini tidak mengganggu stabilitas dan keamanan kawasan yang telah berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat”. Hal ini ditanggapi secara positif oleh Richard Maude, Ketua delegasi Australia yang mengapresiasi upaya bersama ASEAN dalam menentukan sikap di kawasan di tengah persaingan pengaruh

major powers. High Level Dialogue on Indo-Pacific yang diselenggarakan oleh Indonesia juga dipandang sebagai langkah konkret dan tepat untuk meningkatkan rasa saling percaya. Australia juga menegaskan komitmennya untuk terus berkontribusi dalam menjaga stabilitas dan keamanan di Indo-Pasifik. Pertemuan juga membahas berbagai hal yang menjadi kepentingan bersama yaitu perkembangan dan arah ke depan kerja sama ASEAN-Australia antara lain di bidang pemberantasan terorisme, perdagangan dan penyelundupan manusia, kerja sama keamanan siber, kerja sama maritim, kerja sama ekonomi termasuk *ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA)* dan *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)*, konektivitas, pendidikan, penanganan bencana, hubungan antar masyarakat dan lain sebagainya. Selain itu, pada Pertemuan telah pula dilakukan pertukaran pandangan mengenai isu-isu regional dan global lainnya.

Kerja sama ASEAN-Australia dalam bidang ekonomi telah berlangsung sangat kuat. AANZFTA yang menjadi dasar kerja sama ekonomi kedua pihak merupakan salah satu perjanjian perdagangan paling komprehensif antara ASEAN dengan Mitra Wicara. *ASEAN-Australia Development Cooperation Program Phase II (AADCP II)* dengan komitmen sebesar AUD 57 juta dan *AANZFTA Economic Cooperation Support Program (AECSP)* dengan komitmen sebesar AUD 32 juta turut menunjang penguatan kerja sama ekonomi ASEAN dan Australia. Dalam bidang sosial-budaya, pendidikan, pemuda, dan hubungan antar masyarakat menjadi area kerja sama utama. Dalam sepuluh tahun (2008-2018), Australia telah memberikan beasiswa kepada 16.855 pelajar ASEAN melalui program *Australia Awards*. Dan hingga akhir 2019 nanti, terdapat lebih dari 18.500 pelajar dan pemuda Australia yang akan belajar di ASEAN melalui program *New Colombo Plan* (Indonesia Ajak Australia Terus Jaga Stabilitas dan Keamanan di Indo-Pasifik, 2019)

Kemudian Indonesia-Thailand juga mendorong pengembangan konsep Indo-Pasifik ASEAN. Pemerintah Indonesia dan Thailand sepakat berkolaborasi dalam mendorong pengembangan konsep bersama ASEAN mengenai kerja sama Indo-Pasifik. Kesepakatan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri RI Retno usai melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Thailand Don Pramudwinai di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri di Jakarta. Thailand, sebagai ketua ASEAN, mendukung penuh atas pengembangan konsep Indo-Pasifik. Hal tersebut menghasilkan negara-negara anggota ASEAN telah sepakat bahwa perlu adanya pengembangan pandangan bersama tentang konsep Indo-Pasifik berdasarkan perspektif Indonesia yang menekankan sentralitas dan inklusifitas ASEAN (Indonesia-Thailand Dorong Pengembangan Konsep Indo-Pasifik ASEAN, 2019).

Sebagai negara hegemon, penguasaan atas wilayah geografis merupakan keutamaan guna mendukung pencapaian geostrategi. Melalui Indo-Pasifik, AS memiliki *grand strategy* yang memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan nasionalnya beserta negara-negara yang menjadi aliansinya. AS membangun jaringan hubungan diplomatik dengan India guna meningkatkan kembali pengaruhnya di bidang militer dan kekuatan ekonomi. Memastikan akses terhadap sumber daya alam, perluasan target pasar, hingga jalur perairan internasional samudera Hindia dengan memastikan keamanan terhadap *Sea Lines of Communication* (SLOCs). Dari urgensi yang dihadapi AS saat ini, domain maritim menjadi hal yang mendasar guna meyakinkan kembali akan dominasi kekuasaan yang telah berlangsung sejak abad ke-20. Inilah mengapa kawasan Indo-Pasifik menjadi kawasan yang penting dalam lensa politik AS (Irawan, 2018).

Namun berbagai bentuk pertarungan kepentingan negara besar di kawasan menghasilkan kerumitan tersendiri. *Mutual trust* ternyata tidak dapat seutuhnya menghantarkan setiap aktor dikawasan untuk berada pada visi yang sejalan. Persaingan

strategis AS dan Cina setidaknya telah memaksa dunia internasional untuk menyaksikan konflik kepentingan yang berlangsung di segala aspek tanpa terkecuali domain maritim. Tindakan Cina yang memperkuat militernya di Laut Cina Selatan juga bertolak belakang dengan tujuan Indo-Pasifik yang menekan kompetisi atau rivalitas di kawasan (China to increase overseas military bases: Pentagon report, 2019). Karena tindakan itulah negara-negara kawasan mempertanyakan apakah Cina bisa dipercaya atau justru sebaliknya. Lalu mengenai Indo-Pasifik, Cina masih mempertanyakan konsep tersebut. Mengutip dari perkataan Dino Patti Djalal selaku pendiri *Foreign Policy Community of Indonesia*, ia menyebutkan bahwa Cina tidak menanggapi apapun perihal konsep Indo-Pasifik dalam artian tidak menolak tapi juga tidak mendukung. Dino menambahkan bahwa Cina belum mencerna konsep Indo-Pasifik dengan baik, namun mereka berpendapat bahwa ini merupakan konsep yang penting (Cina Pertanyakan Konsep Indo-Pasifik ASEAN, 2019)